



JURNAL DINAMIKA PENGABDIAN

VOLUME 11 NOMOR 4, EDISI JULI 2026

p-ISSN: 2460-8173, e-ISSN: 2528-3219

Website: <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jdp/index>



LITERASI PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI BAGI PELAKU UMKM DI KABUPATEN MAROS

Siti Haerani^{*1)}, Darmawati¹⁾, Rahmawati HS¹⁾, Achmad Fatri Handrasula²⁾,
dan Aliyah Ilyas¹⁾

**e-mail: haeranisiti9@gmail.com.*

¹⁾ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin.

²⁾ Fakultas Ekonomi, STIE Tri Dharma Nusantara.

Diserahkan tanggal 11 Januari 2026, disetujui tanggal 25 Juli 2026

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, termasuk di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Namun, pertumbuhan jumlah UMKM belum diimbangi dengan literasi keuangan yang memadai, khususnya dalam perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP). Banyak pelaku UMKM menetapkan harga jual berdasarkan perkiraan tanpa mempertimbangkan seluruh komponen biaya produksi, sehingga berisiko mengalami kerugian tanpa disadari. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi perhitungan HPP bagi pelaku UMKM di Kabupaten Maros sebagai dasar penetapan harga jual yang lebih akurat dan berkelanjutan. Metode pelaksanaan meliputi ceramah interaktif, diskusi, latihan praktik, studi kasus berbasis data riil usaha peserta, serta pendampingan berkelanjutan. Kegiatan diikuti oleh 30 pelaku UMKM dari berbagai sektor dan dilaksanakan di PLUT Kabupaten Maros pada 7 November 2025. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta dalam mengidentifikasi komponen biaya produksi, menghitung HPP per unit, memahami konsep *Break Even Point* (BEP), serta menetapkan harga jual berbasis HPP. Peserta juga lebih sadar akan pentingnya pencatatan keuangan yang sistematis dan pemisahan keuangan pribadi dengan usaha. Secara keseluruhan, program ini berkontribusi pada penguatan kapasitas manajemen biaya UMKM dan mendukung keberlanjutan usaha mereka..

Kata kunci: Literasi Keuangan, UMKM, Harga Pokok Produksi, Penetapan Harga.

ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in Indonesia's economy, including in Maros Regency, South Sulawesi. However, the rapid growth of MSMEs has not been accompanied by adequate financial literacy, particularly in calculating the Cost of Goods Manufactured (COGM). Many MSME actors determine selling prices based on estimates without considering all production cost components, which risks causing unrecognized losses. This community service program aimed to improve MSMEs' literacy in calculating COGM as a basis for more accurate and sustainable pricing decisions. The methods used included interactive lectures, discussions, practical exercises, case studies based on participants' real business data, and continuous mentoring. The program involved 30 MSME participants from various sectors and was conducted at the Integrated Business Service Center (PLUT) of Maros Regency on November 7, 2025. The results indicate an improvement in participants' understanding of identifying



production cost components, calculating COGM per unit, comprehending the Break-Even Point (BEP) concept, and setting selling prices based on COGM. Participants also became more aware of the importance of systematic financial recording and separating personal and business finances. Overall, this program contributed to strengthening MSMEs' cost management capacity and supporting their business sustainability.

Keywords: Financial Literacy, MSMEs, Cost of Goods Manufactured, Pricing.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2023 tercatat sekitar 66 juta unit UMKM di Indonesia (BPS, 2024). UMKM berkontribusi sebesar 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap lebih dari 117 juta tenaga kerja atau sekitar 97 persen dari total angkatan kerja (GoodStats, 2023). Kontribusi ini menunjukkan bahwa UMKM bukan hanya menopang perekonomian tetapi juga menjadi tumpuan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Tren serupa juga terlihat di Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam lima tahun terakhir, jumlah UMKM meningkat pesat dari sekitar 944 ribu unit pada tahun 2019 menjadi 1,8 juta unit pada tahun 2024 (Wartakini, 2024). Pertumbuhan tersebut menunjukkan besarnya potensi sektor UMKM sebagai motor penggerak ekonomi lokal (Buletin Energi, 2024). Kabupaten Maros sebagai salah satu daerah penyangga utama Kota Makassar, tercatat sebagai kabupaten dengan jumlah UMKM terbanyak di Sulawesi Selatan. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Sulsel (2024),

terdapat lebih dari 80 ribu unit UMKM yang tersebar pada sektor kuliner, kerajinan, perdagangan, dan industri rumah tangga. Posisi geografis Maros yang dekat dengan pusat pertumbuhan ekonomi menjadikannya wilayah strategis sekaligus basis penting pengembangan UMKM di provinsi tersebut.

Namun, di balik pertumbuhan jumlah UMKM tersebut, masih terdapat berbagai kendala mendasar yang menghambat optimalisasi usaha terutama dari sisi literasi keuangan. Salah satunya adalah keterbatasan akses pembiayaan. Realisasi penyaluran kredit UMKM di Sulawesi Selatan pada akhir 2024 hanya tumbuh 1,98 persen dengan total penyaluran Rp61,52 triliun (Bisnis.com, 2024), sementara jumlah debitur justru menurun menjadi 910.178 orang (Kabarmakassar, 2024). Rendahnya akses pembiayaan ini sering kali terkait dengan ketidakmampuan pelaku UMKM menyajikan laporan keuangan sederhana dan analisis biaya usaha yang diperlukan sebagai syarat administrasi perbankan.

Di sisi lain, digitalisasi usaha menunjukkan perkembangan positif. Hingga akhir 2024, Sulawesi Selatan mencatat sekitar 1,09 juta merchant QRIS dan lebih dari 73 persen

merupakan UMKM (Kabarmakassar, 2024). Kabupaten Maros sendiri menyumbang 45.726 merchant QRIS yang menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha sudah mulai memanfaatkan teknologi digital dalam proses transaksi. Namun, kemajuan digitalisasi tersebut tidak diikuti dengan penguatan literasi keuangan di tingkat pelaku usaha. UMKM Maros aktif menggunakan teknologi untuk memasarkan produk, tetapi tidak memiliki kemampuan yang memadai dalam menghitung biaya produksi, menyusun laporan keuangan sederhana, dan mengelola modal kerja secara efektif.

Fenomena rendahnya literasi keuangan ini terlihat jelas dari hasil pendampingan PLUT Maros dan temuan lapangan beberapa tahun terakhir. Lebih dari 70 persen pelaku UMKM tidak memiliki pencatatan arus kas, tidak memisahkan keuangan pribadi dan usaha, serta mengambil keputusan bisnis berdasarkan intuisi. Banyak pelaku usaha tidak mengetahui secara pasti besarnya laba per produk, berapa total biaya produksi, atau komponen biaya apa saja yang seharusnya diperhitungkan. Kondisi ini menyebabkan pelaku UMKM rentan salah menentukan harga jual dan tidak mampu menilai apakah usahanya benar-benar memberikan keuntungan.

Rendahnya kemampuan menghitung Harga Pokok Produksi (HPP) menjadi salah satu bentuk paling nyata dari lemahnya literasi keuangan UMKM Maros. Banyak pelaku usaha hanya menghitung biaya bahan baku

saat menentukan harga jual, sementara biaya tenaga kerja, gas, listrik, transportasi, dan penyusutan alat tidak dimasukkan ke dalam perhitungan. Fenomena ini ditemukan secara konsisten dalam pendampingan UMKM Maros pada tahun 2024, di mana sejumlah pelaku usaha di sektor kuliner dan kerajinan ternyata menjual produk dengan harga di bawah HPP tanpa mereka sadari. Pelaku UMKM merasa usahanya “ramai”, tetapi keuntungan tidak bertambah, yang menunjukkan bahwa mereka bekerja keras tanpa memperoleh margin yang layak.

Kondisi tersebut sejalan dengan berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa rendahnya literasi akuntansi biaya merupakan kendala serius bagi UMKM Indonesia. Trianawati & Sarwono (2025) menyatakan bahwa sebagian besar UMKM mengelola keuangan secara sederhana tanpa pencatatan rinci. Khuluqi et al. (2024) menemukan bahwa banyak UMKM tidak memahami pentingnya mencatat semua pengeluaran dalam perhitungan HPP sehingga harga jual menjadi tidak tepat. Penelitian Rachmawati & Karim (2022) memperkuat bahwa kurangnya pemahaman tentang komponen biaya produksi mengakibatkan penetapan harga yang tidak akurat dan margin keuntungan yang tidak optimal. Sementara itu, Yustitia & Adriansah (2022) menegaskan bahwa metode perhitungan HPP yang komprehensif seperti full costing sangat penting agar harga jual mencerminkan biaya produksi sebenarnya.

Dengan demikian, persoalan utama UMKM Maros bukan hanya terkait jumlah UMKM yang besar atau kesiapan digital yang meningkat, tetapi juga terletak pada lemahnya literasi keuangan, khususnya dalam perhitungan HPP. Rendahnya pemahaman tentang HPP menyebabkan UMKM tidak mampu menentukan harga jual secara wajar, sulit mengelola biaya, dan tidak dapat mengevaluasi efisiensi usahanya. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menghambat pertumbuhan usaha dan mengurangi daya saing UMKM di pasar.

Berdasarkan fakta dan fenomena tersebut, literasi perhitungan HPP menjadi kebutuhan mendesak bagi pelaku UMKM di Kabupaten Maros. Kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul “Literasi Perhitungan Harga Pokok Produksi untuk Mendukung Peningkatan Pendapatan dan Keberlanjutan Usaha UMKM di Kabupaten Maros” dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut. Pelatihan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terhadap konsep HPP, tetapi juga membantu mereka menerapkan perhitungan biaya produksi secara akurat sebagai dasar pengambilan keputusan usaha yang lebih profesional dan berkelanjutan.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui metode ceramah, diskusi, latihan (*practice*), tanya jawab, serta studi

kasus berbasis data riil usaha peserta. Untuk menjaga dinamika dan partisipasi aktif para pelaku UMKM, beberapa sesi diselengi dengan kegiatan *ice breaking* agar proses pembelajaran tetap kondusif, interaktif, dan tidak monoton.

Tim pelaksana kegiatan terdiri dari dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang memiliki kepakaran di bidang Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan serta Pengembangan Perilaku Bisnis dan Kewirausahaan. Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan dosen dengan keahlian di bidang akuntansi keuangan, auditing, akuntansi biaya, serta pengembangan UMKM. Seluruh anggota tim berperan sebagai pemateri dan pendamping sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 7 November 2025 pukul 09.00 hingga 16.00 WITA, bertempat di Aula Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Maros. Mitra yang terlibat dalam kegiatan ini adalah para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Maros, serta anggota dan pendamping dari PLUT Kabupaten Maros yang berperan aktif dalam pembinaan dan pengembangan UMKM daerah.

Metode pembelajaran dirancang secara partisipatif agar peserta dapat memahami konsep perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) secara sederhana namun aplikatif, serta

mampu menerapkannya secara langsung pada usaha masing-masing. Kegiatan ini berfokus pada empat materi utama yang telah

disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik UMKM di Kabupaten Maros, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Materi Pelatihan Pengabdian Kepada Masyarakat.

No.	Materi	Pemateri	Kepakaran
1.	Manajemen Bisnis & Kewirausahaan	Prof. Dr. Siti Haerani, S.E, M.Si	Manajemen SDM
2.	Urgensi Literasi Keuangan UMKM & Motivasi Usaha	Dr. Rahmawati HS, S.E, M.Si, Ak, CA	Akuntansi Keuangan
3.	Identifikasi Komponen Biaya Produksi dan metode Perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP)	Prof. Dr. Darmawati, SE.,M.Si.,Ak.,CA., CRA., ASEAN CPA	Akuntansi Pemerintahan
4.	Konsep <i>Break-Even Point</i> (BEP) dan Penetapan Harga Jual Berbasis Harga Pokok Produksi (HPP)	Prof. Dr. Darmawati, SE.,M.Si.,Ak.,CA., CRA., ASEAN CPA	Akuntansi Pemerintahan

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Jumlah Peserta.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diikuti oleh 30 pelaku UMKM yang berasal dari berbagai sektor usaha seperti kuliner, minuman, kerajinan, fashion, jasa, dan industri rumah tangga. Keberagaman peserta ini memberikan dinamika pembelajaran yang lebih kaya karena setiap pelaku usaha membawa pengalaman, kendala, serta karakteristik biaya produksi yang berbeda. Sebagian besar peserta belum pernah menghitung Harga Pokok Produksi (HPP) secara sistematis sehingga mereka menyambut baik kegiatan ini. Mereka menilai bahwa pelatihan perhitungan HPP merupakan kebutuhan mendesak karena selama ini

proses penentuan harga jual lebih banyak dilakukan dengan perkiraan tanpa mempertimbangkan komponen biaya secara menyeluruh.

B. Tempat Pelaksanaan.

Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan di Aula Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros. Lokasi ini dipilih karena merupakan pusat pengembangan dan pembinaan UMKM di Kabupaten Maros yang dilengkapi fasilitas pelatihan serta mudah dijangkau oleh peserta dari berbagai kecamatan. PLUT juga selama ini berfungsi sebagai pusat konsultasi bagi pelaku UMKM sehingga lingkungan yang familiar bagi peserta turut membantu kelancaran kegiatan. Pelaksanaan kegiatan di PLUT sekaligus

memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dengan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kapasitas UMKM.

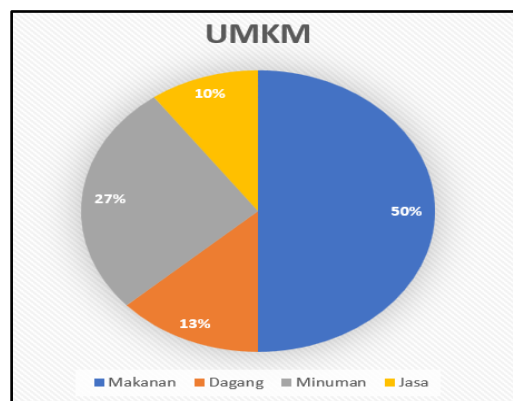
C. Waktu Pelaksanaan.

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 7 November 2025 mulai pukul 09.00 hingga 16.00 WITA. Penjadwalan dilakukan pada pagi hingga sore hari dengan pertimbangan penyajian materi memerlukan waktu yang lebih lama untuk memberi pemahaman konsep prosedur, perhitungan dan praktik untuk mengidentifikasi biaya dan perhitungan HPP. Pada rentang waktu tersebut, seluruh rangkaian mulai dari registrasi, pembukaan, penyampaian materi, praktik studi kasus, tanya jawab, hingga pendampingan dapat

berlangsung dengan efektif. Peserta mengikuti kegiatan dengan antusias dan aktif terlibat dalam setiap sesi.

D. Karakteristik Peserta Pelatihan.

Berdasarkan data yang diisikan oleh para peserta, diketahui bahwa jenis produk yang dihasilkan oleh UMKM peserta pelatihan yaitu 50% bergerak di industri (olahan) makanan, 27% bergerak di industri (olahan) minuman, 17% bergerak di usaha dagang, dan 10% bergerak di usaha jasa. Fakta ini menggambarkan bahwa 57 persen peserta pelatihan termasuk kategori IKM (Industri Kecil dan Menengah) karena mengolah bahan baku menjadi barang jadi sebagai ciri dari perusahaan yang dapat disebut sebagai kategori industri.



Gambar 1. Jenis Usaha Pelaku UMKM.

E. Pelaksanaan Kegiatan.

1. Registrasi, Pembukaan, dan Sosialisasi Urgensi Kegiatan.

Tahap awal kegiatan dimulai dengan registrasi peserta yang dilakukan untuk mencatat identitas usaha serta sektor yang digeluti

oleh masing-masing peserta. Setelah proses registrasi selesai, kegiatan dilanjutkan dengan pembukaan oleh tim pelaksana yang menyampaikan latar belakang program, tujuan kegiatan, dan urgensi peningkatan literasi perhitungan HPP bagi pelaku UMKM di Kabupaten

Maros. Pada tahap sosialisasi ini dijelaskan bahwa sebagian besar UMKM menetapkan harga jual berdasarkan perkiraan tanpa analisis biaya yang akurat, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian. Peserta juga diperkenalkan pada pentingnya pencatatan biaya, akurasi perhitungan HPP, serta manfaatnya dalam meningkatkan efisiensi, margin keuntungan, dan keberlanjutan usaha. Sosialisasi ini menjadi fondasi bagi peserta untuk memahami konteks dan arah kegiatan pelatihan.

2. Penyampaian Materi.

Sesi penyampaian materi merupakan inti dari kegiatan dan disampaikan melalui metode ceramah interaktif. Materi mencakup konsep dasar HPP, komponen biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead, teknik perhitungan HPP sederhana, serta

pengenalan konsep Break Even Point (BEP) dan cara menetapkan harga jual berdasarkan hasil perhitungan HPP.

a. Materi Motivasi dan Urgensi Literasi Keuangan UMKM.

Materi ini bertujuan menumbuhkan pemahaman bahwa UMKM tidak dapat berkembang tanpa pengelolaan keuangan yang baik. Peserta dijelaskan mengenai peran literasi keuangan dalam meningkatkan profit, pentingnya kesadaran mencatat pengeluaran kecil yang sering diabaikan, dan contoh kasus kerugian UMKM akibat salah menentukan harga jual. Materi ini memotivasi peserta untuk lebih disiplin mencatat biaya produksi dan memahami bahwa kesalahan satu komponen biaya dapat menurunkan profit secara signifikan (Gambar 2).



Gambar 2. Pemaparan Materi Motivasi Kepada Pelaku UMKM.

b. Identifikasi Komponen Biaya Produksi.

Instruktur menjelaskan tiga komponen utama HPP:

1. Biaya bahan baku langsung, seperti tepung, minyak, bumbu, kemasan, bahan utama kerajinan.

2. Biaya tenaga kerja langsung, termasuk tenaga kerja keluarga yang sebelumnya tidak dihitung.
3. Biaya overhead, seperti gas, listrik, bensin distribusi, penyusutan alat, air, plastik tambahan.

Peserta diminta mengidentifikasi seluruh biaya dalam usahanya, termasuk biaya kecil yang sering tidak dianggap sebagai biaya produksi, padahal sangat memengaruhi nilai HPP (Gambar 3).

c. Materi Break Even Point (BEP).

Materi Break Even Point (BEP) menjelaskan konsep titik impas, yaitu kondisi ketika total pendapatan sama dengan total biaya sehingga usaha tidak mengalami laba maupun rugi. Dalam sesi ini, peserta diajarkan secara bertahap cara menghitung BEP unit dan BEP rupiah, menganalisis jumlah minimum penju-

lan agar usaha tidak merugi, serta menyusun proyeksi volume penjualan yang diperlukan untuk mencapai target keuntungan yang diharapkan.

Melalui simulasi perhitungan dan contoh kasus riil usaha peserta, mereka mulai memahami keterkaitan antara biaya produksi, harga jual, dan volume penjualan. Peserta menyadari bahwa meskipun usaha mereka terlihat berjalan baik dan ramai pembeli, beberapa produk ternyata belum mencapai titik impas karena penetapan harga yang keliru atau tidak berbasis perhitungan biaya yang akurat. Pemahaman ini mendorong peserta untuk lebih berhati-hati dalam menentukan harga jual dan merencanakan strategi penjualan yang lebih realistis serta menguntungkan bagi keberlanjutan usaha mereka (Gambar 4).



Gambar 3. Pemaparan Materi Identifikasi Biaya.



Gambar 4. Pemaparan Materi BEP.

d. Materi Penetapan Harga Jual Berbasis HPP.

Materi ini menjelaskan teknik menentukan harga jual dengan metode markup standar UMKM, penyesuaian margin keuntungan, strategi penentuan harga psikologis (*odd pricing*), cara menaikkan harga tanpa kehilangan pelanggan. Peserta diperlihatkan perbandingan simulasi harga jual “berdasarkan perkiraan” versus “berdasarkan HPP”. Hampir semua peserta baru menyadari bahwa harga jual mereka sebelumnya tidak menutup seluruh biaya produksi.

4. Pelatihan Studi Kasus Usaha Peserta.

Setelah menerima pembekalan teori, peserta diarahkan untuk mengikuti sesi pelatihan berbasis studi kasus menggunakan data riil usaha mereka sendiri. Peserta membawa data biaya seperti harga bahan baku, jumlah produksi, biaya utilitas, biaya tenaga kerja, dan biaya operasional lainnya.

Dengan menggunakan data tersebut, peserta dibimbing untuk mengelompokkan biaya, memasukkannya ke format perhitungan, menghitung total biaya produksi, hingga menyusun HPP per unit. Pada tahap ini terlihat bahwa sebagian peserta baru menyadari bahwa harga jual produk yang selama ini mereka tetapkan ternyata berada di bawah nilai HPP, sehingga secara tidak langsung usaha mereka mengalami kerugian. Melalui sesi ini peserta belajar bahwa perhitungan HPP yang akurat sangat penting dalam memastikan keberlanjutan

usaha dan mencegah kesalahan dalam menetapkan harga jual.

5. Sesi Tanya Jawab dan Diskusi.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang berlangsung secara aktif dan interaktif. Peserta mengajukan berbagai pertanyaan terkait kendala dalam pencatatan biaya, cara menghitung penyusutan aset, perbedaan biaya usaha dan biaya pribadi, hingga cara menentukan margin keuntungan yang ideal. Diskusi berlangsung dinamis karena banyak peserta yang selama ini tidak pernah memisahkan biaya pribadi dan biaya usaha, serta kesulitan mengelompokkan biaya produksi. Sesi ini memberikan kesempatan bagi peserta untuk memperdalam pemahaman dan memperoleh solusi praktis yang sesuai dengan kondisi usaha masing-masing. Selain itu, proses diskusi juga memungkinkan terjadinya pertukaran pengalaman antarpeserta sehingga memperkaya perspektif dan wawasan mereka (Gambar 5).

6. Pendampingan Usaha.

Pendampingan dilakukan setelah sesi pelatihan utama, baik secara langsung di lokasi kegiatan maupun melalui konsultasi personal melalui WhatsApp. Pada tahap pendampingan, peserta dapat menyampaikan permasalahan spesifik dalam usaha mereka secara lebih detail. Tim pelaksana memberikan arahan teknis mengenai penyusunan perhitungan HPP, pencatatan biaya yang rapi, serta metode menentukan harga jual yang

tepat. Pendampingan berkelanjutan ini memberikan manfaat besar bagi peserta karena mereka dapat menerapkan metode yang telah dipelajari dan mendapatkan bantuan ketika menghadapi kendala dalam praktik sehari-

hari. Pendampingan melalui WhatsApp memungkinkan peserta tetap mendapatkan bimbingan meskipun kegiatan tatap muka telah selesai (Gambar 6).



Gambar 4. Salah Satu UMKM Bertanya.



Gambar 5. Sesi Konsultasi dan Pendampingan Usaha.

C. Evaluasi Melalui Diskusi dan Penyelesaian Studi Kasus.

Evaluasi kegiatan dilakukan secara kualitatif melalui observasi keterlibatan peserta dalam diskusi, kemampuan menjelaskan ulang materi, dan kemampuan menyelesaikan studi kasus berdasarkan data usaha masing-masing. Evaluasi ini tidak menggunakan *pre-test* dan *post-test*, melainkan mengutamakan pengukuran melalui partisipasi dan kemam-

puan aplikasi langsung. Dari hasil evaluasi terlihat bahwa sebagian besar peserta mampu menyusun perhitungan HPP secara mandiri dengan tingkat pemahaman yang cukup baik. Beberapa peserta juga menunjukkan inisiatif untuk memperbaiki sistem pencatatan keuangan usaha mereka setelah memahami pentingnya akurasi biaya. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi dan rencana tindak lanjut kegiatan.



Gambar 6. Dokumentasi Bersama.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat mengenai literasi perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) bagi pelaku UMKM di Kabupaten Maros telah berlangsung dengan baik dan memberikan dampak positif bagi peserta. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya pencatatan biaya produksi, pengelompokan komponen biaya, serta penyusunan HPP secara sistematis sebagai dasar penetapan harga jual yang lebih akurat dan berkelanjutan. Melalui pendekatan partisipatif dan aplikatif, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis, tetapi juga mampu mempraktikkan secara

langsung perhitungan HPP berdasarkan data riil usaha mereka.

Pelaksanaan pelatihan, studi kasus, diskusi, pendampingan, dan evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta mengalami peningkatan kemampuan dalam mengidentifikasi biaya, menghitung HPP per unit, serta menentukan harga jual dengan mempertimbangkan margin keuntungan yang wajar. Selain itu, peserta juga menyadari pentingnya pencatatan keuangan yang teratur untuk mendukung keberlanjutan usaha. Kegiatan ini sekaligus memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kapasitas UMKM melalui literasi keuangan.

Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kompetensi pelaku UMKM khususnya dalam aspek manajemen biaya dan penetapan harga. Diharapkan pelaku UMKM dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh secara konsisten dalam operasional sehari-hari serta mengembangkan usaha mereka menuju tingkat efisiensi dan daya saing yang lebih tinggi. Keberhasilan kegiatan ini juga membuka peluang bagi pelaksanaan program lanjutan yang berfokus pada peningkatan literasi keuangan, manajemen usaha, dan digitalisasi yang lebih komprehensif di masa mendatang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berjudul “Literasi Perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) untuk Mendukung Peningkatan Pendapatan dan Keberlanjutan Usaha UMKM di Kabupaten Maros” dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Tim Pengabdian kepada Masyarakat menyampaikan terima kasih kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas dukungan pendanaan melalui Hibah Peningkatan Kinerja Utama (KIPKU) FEB Tahun 2025. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Maros, khususnya Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros, atas fasilitasi tempat dan dukungan pelaksanaan kegiatan di

PLUT Kabupaten Maros. Apresiasi juga diberikan kepada seluruh peserta UMKM atas partisipasi dan antusiasme selama kegiatan, serta kepada Tim Pengabdian kepada Masyarakat KIPKU FEB yang telah berkontribusi secara maksimal sejak tahap persiapan hingga pelaporan. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat dan kontribusi nyata bagi pengembangan UMKM di Kabupaten Maros.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). Statistik usaha mikro, kecil, dan menengah 2023. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bisnis.com. (2024, Desember 15). Penyaluran kredit UMKM di Sulawesi Selatan tumbuh 1,98 persen. Retrieved from <https://www.bisnis.com>
- Buletin Energi. (2024). Pertumbuhan UMKM di Sulawesi Selatan meningkat signifikan. Retrieved from <https://www.buletinenergi.com>
- Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan. (2024). Data UMKM Kabupaten Maros tahun 2024. Makassar: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan.
- GoodStats. (2023). Kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia 2023. Retrieved from <https://www.goodstats.id>
- Kabarmakassar. (2024, Januari 10). Jumlah merchant QRIS di Sulsel capai 1,09 juta, 73 persen UMKM. Retrieved from <https://www.kabarmakassar.com>
- Khuluqi, K., Sugeng, A., & Soeparyono, R.D. (2024). Edukasi Perhitungan Harga Pokok Produksi untuk Meningkatkan Penjualan pada Kube Wanita UMKM Pamulang Estate. Jurnal PKM

- Manajemen Bisnis, 4(2), 310-320.
<https://ojs.pseb.or.id/index.php/pkm/article/download/896/701/1797>
- Pemerintah Kabupaten Maros. (2024). Rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Maros 2025–2030. Maros: Pemkab Maros.
- Rachmawati, W., & Karim, A. (2022). Penentuan Harga Pokok Produksi pada UMKM di Kelurahan Ngesrep Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. *Journal of Community Service and Engagement*, 2(6), 13-19.
- Trianawati, S. M., & Sarwono, A. E. (2025). Perhitungan Harga Pokok Produksi Pada UMKM Surakarta. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 8(2), 30-40.
<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAKK/article/download/22941/pdf>
- Wartakini. (2024, Februari 5). UMKM di Sulsel tumbuh jadi 1,8 juta unit. Retrieved from <https://www.wartakini.com>
- Yustitia, E., & Adriansah, A. (2022). Pendampingan Penentuan Harga Pokok Produksi (HPP) dan Harga Jual pada UMKM di Desa Sawahkulon. *Jumat Ekonomi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 1-9.
https://doi.org/10.32764/abdimas_e_kon.v3i1.2506